

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto, Seno, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Al-Azhar, Muhammad Nuh, 2012, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta.
- Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Anam, Khairul, 2010, *Hacking VS Hukum Positif & Islam*, Sunan Kalijaga Pers, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2012. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Depok.
- _____, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 15
- Bassir, M. Sudrajat, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.
- Bosu, Benedictus, 2004, *Menuju Indonesia Baru – Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia, Malang
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Eddyono, Supriyadi Widodo & Erasmus A. T. Napitupulu., 2013, *Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHP*. Institut for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Ermansjah, Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fakhriah, Efa Laila, 2009, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, ALUMNI, Bandung.
- Garner A, Bryan, ed., 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomson West, Eighth

Edition, St.Paul Minnesota.

Hamzah, Andi 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2012, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy, O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Kaligis, O. C, 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prateknya*, Yarsif Watampone, Jakarta

Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Krisnawati, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Lamintang, PAF, 1987, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Makarim, Edmon makarim, 2004, *Komplikasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Makarao, Mohammad Taufik, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Manan, Bagir, “Penyadapan Komunikasi atau Korespondensi Pribadi”, *Varia Peradilan*, Tahun XXV No. 298 September 2010.

Mansyur, Semma, 2008, *Negara dan Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Manthovani, Reda, 2015, *Penyadapan vs Privasi*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.

M. Ramli, Ahmad, 2005, Pager Gunung, dan Indra Apriyadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta.

- Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Muhamad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muladi, 2003, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2002, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, (Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia)*, The Habibie Center, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Bismar, 2002, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil Penulisan pada Mahalah Akreditasi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Panjaitan, Hinca IP, dkk, 2005, *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, IMLPC Cetakan Pertama, Jakarta.
- Pompe, W.P.J, 1981, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, NV Uitgevermaatschappij W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwollo, 1959, dikutip oleh Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Raz, Joseph, 1979, *The Rule of Law and Its Virtue, in the Authority of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Sanusi, M. Arsyad, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw :Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sujono, A.R. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.

Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsudin, Azis, 2007. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tobing, Raida L., 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Tresna, R, 2000, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Wahid, Abdul dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme. dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung

Wisnubroto, Ali, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.

Wisnubroto, Al dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Artikel Jurnal

Sinaga, Adhy Iswara, dkk, “Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia”, *USU LAW Journal*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2015

Hamdi, Syaibatul, dkk, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 4, November 2013

C. Hasil Penelitian

Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi, 2012, *Tutorial Interaktif Instalasi Komputer Forensik (Menggunakan Aplikasi Open Source)*, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

Muhajir, Akmal, 2016, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Akses Ilegal”, *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.*

Heryogi, Arief, 2017, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016”, *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.*

D. Makalah / Pidato

Himam, Muhammad Neil el, “Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian”, *Pidato*, Seminar tentang Digital Forensik, Semarang, 24 Oktober 2012

Jaya, Nyoman Serikat Putra, “Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum”, Matrikulasi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Tahun, *Makalah*, Semarang, 18 September 2010.

Sarwoko, Djoko, “Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU NO.11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)”, *Makalah*, 7 September 2009

E. Internet

Guntoro Sekti, Eka, “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Perluasn Alat Bukti dalam Perkara Pidana”,
<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/05/17/informasi-elektronik-dan-dokumen-elektronik-sebagai-perluasan-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/>, diakses 11 Desember 2018

Pramesti, Tri Jata Ayu, “Perbedaan Menyadap dan Merekam”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt566f607210efa/perbedaan-menyadap-dan-merekam>, diakses 20 Desember 2018

Politikum, “Pengertian Alat Bukti yang Sah”, dalam
<http://politikum.blogspot.com/2003/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diakses 12 Desember 2018

Rofiq, Ahmad, “Baleg Usul SOP Penyadapan KPK Masuk dalam RUU Penyadapan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0f9adc2f6cb/baleg-usul-sop-penyadapan-kpk-masuk-dalam-ruu-penyadapan>, diakses 20 Desember 2018

Sitompul, Josua, “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses 13 Desember 2018

Yuhendra, “Cara-Cara Penyadapan”, <http://yuhendrablog.wordpress.com>,
diakses 20 Oktober 2018

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4284)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

G. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 24 Februari 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 7 September 2016